

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA CINENGAH KECAMATAN RONGGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Adji Priatna Anwar<sup>1)</sup> \*Fitri Melawati<sup>2)</sup>

1), 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, Indonesia

\*Email Korespondensi: [fitrimelawati@gmail.com](mailto:fitrimelawati@gmail.com)

Submitted: 14-11-2023 | Accepted: 05-02-2024 | Published: 05-02-2024

### **Kata Kunci:**

Efektivitas;  
Pengelolaan  
Dana Desa;  
Pembangunan  
Infrastruktur  
Perdesaan

### **Abstrak**

Efektivitas pembangunan pada tingkat desa merupakan tuntutan bagi pengembangan desa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya perlu ditunjang oleh pengelolaan anggaran pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalamnya adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur perdesaan. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan berjumlah 8 orang yang ditetapkan secara purposif. Kemudian, analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari pembahasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat sudah efektif, namun belum maksimal. Hal ini tampak dari aktivitas pembangunan yang sudah cukup memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitasnya yang baik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sudah sesuai dengan rencana dalam RKPDes dan RPJMDes, pembangunan infrastruktur perdesaan telah dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sudah memanfaatkan hasil perkembangan teknologi, adanya peningkatan kapasitas pegawai serta pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan, sekalipun belum dilaksanakan secara merata.

### **Keywords:**

Effectiveness  
of Village  
Fund

### **Abstract**

*The effectiveness of development at the village level is a demand for village development that contributes to improving community welfare. This realization needs to be supported by managing the village*

*Management;  
Rural  
Infrastructure  
Development.*

*development budget in accordance with statutory regulations. This includes the effectiveness of Village Fund management in rural infrastructure development. On this basis, this research seeks to examine the Effectiveness of Village Fund Management in Rural Infrastructure Development in Cinengah Village, Rongga District, West Bandung Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. There were 8 informants who were determined purposively. Then, data analysis uses an interactive model which includes data reduction, data analysis, and drawing conclusions. The results of the research show that the management of Village Funds in developing rural infrastructure in Cinengah Village, Rongga District, West Bandung Regency has been effective, but not yet optimal. This can be seen from development activities which are sufficient to meet some of the community's needs with good quality, the implementation of rural infrastructure development which is in accordance with plans in the RKPDes and RPJMDes, rural infrastructure development has been carried out based on community aspirations and has utilized the results of technological developments, there has been an increase in capacity. employees and development of facilities and infrastructure based on needs, even if it has not been implemented evenly.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan telah menjadi frase magnetis dan ideologi semua negara, sehingga setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakannya untuk melepaskan diri dari segala bentuk keterbelakangan, kekurangan menuju kesejahteraan dan keadilan. Pelaksanaannya mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang dimulai dari tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan. Pembangunan desa memiliki posisi strategis karena tidak saja sekira 78 % penduduk Indonesia tinggal di perdesaan, tetapi juga mayoritas taraf hidup penduduknya masih dalam belunggu kemiskinan, keterbelakangan disertai dengan berbagai kerawanan sosial lainnya (Mc Andrew; Ichlasul Amal, 2001). Perspektif ini mengisyaratkan pentingnya memberikan orientasi pada pembangunan di perdesaan, mengingat desa bukan sebagai hinterland tetapi titik sentral kehidupan rakyat dan negara. Sebab itu, sangat beralasan apabila pemerintah menetapkan kebijakan tentang

pembangunan desa dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhannya menjadi desa swasembada yang kedudukannya sebagai subjek pembangunan (Marbun, 2008).

Salah satu kebijakan pemerintah itu berupa Dana Desa (DD). DD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang kemudian diserahkan kepada daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Atas dasar ini, DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima DD tersebut adalah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) agar pertanggungjawabannya menyatu dengan pertanggungjawaban APBDes. Kemudian, melalui DD maka pemerintah menyediakan block grant guna dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemberiannya kepada setiap desa berdasarkan kriteria seperti jumlah penduduk (30 %), luas wilayah (20 %) dan angka kemiskinan (50 %) serta disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa (PP Nomor 8 Tahun 2016). Adapun pencairannya pada setiap tahun bagi setiap desa diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan DD pada tahun sebelumnya dan menyusun rancangan rencana pembangunan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dan daftar usulan RKP desa.

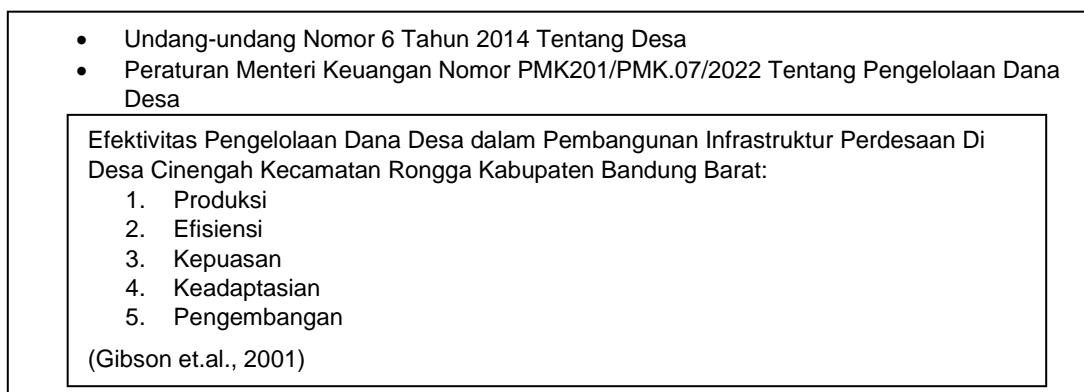
Sekalipun DD mengandung pergeseran nilai autarki desa karena merubah otonomi desa menjadi berbasis bantuan dan menjadikannya sebagai agent pemerintah pusat (Elcock, 2005), namun perubahan tersebut untuk mewujudkan pemerintah desa sebagai birokrasi modern yang memiliki tanggung jawab terhadap publik. Pemerintah desa sebagai ujung tombak baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan dituntut

menjadi sosok lembaga yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Pada praktiknya hal tersebut dilakukan melalui fungsi mediating structure yang menterjemahkan penggunaan DD ke dalam jenis kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritasnya sebagai komponen penting bagi keberhasilan pembangunan desa agar tidak menjadikannya sebagai necropolis rural. Di antara prioritas pembangunan dimaksud adalah pembangunan infrastruktur perdesaan. Infrastruktur perdesaan merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang menentukan keberhasilan pembangunan desa, yang dalam perkembangannya tidak hanya dideskripsikan sebagai asset fisik seperti jalan, sistem distribusi air, dan sanitasi, tetapi mencakup pula jenis infrastruktur yang bersifat soft seperti sistem informasi dan knowledge base (Parikesit, 2004). Bertumpu kepada hal tersebut, maka pembangunan infrastruktur harus dirancang secara efektif termasuk pengelolaan DD sebagai sumber pendanaannya agar mencapai target yang telah ditentukan (Sedarmayanti, 2006). Meskipun demikian, pada realitasnya hal tersebut belum secara keseluruhan bersifat efektif seperti yang terjadi di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat yang ditunjukkan oleh kurang pahamnya perangkat desa terhadap pola perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, terlambatnya pencairan DD disebabkan oleh terlambatnya penyusunan laporan pertanggungjawaban DD pada tahun sebelumnya, dan kurang efektifnya sosialisasi pemanfaatan DD oleh dinas terkait sehingga menguatkan kurang pahamnya pemerintah desa terhadap pola perencanaan dan penganggaran keuangan yang bersumber dari DD untuk pembangunan infrastruktur perdesaan. Padahal seluruh aktivitas tersebut dipandang penting untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan (Sedarmayanti, 2006). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sholihatul Fitri (2019) bahwa pengelolaan DD sangat penting bagi terwujudnya kualitas pembangunan desa (Solihatul, 2019). Selain itu, hasil

penelitian Ahmad Fauzy (2019) mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan DD sangat penting dalam pembangunan infrastruktur perdesaan (Fauzi, 2019). Hubungannya dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau disebut sebagai *interpretative research*. Melalui metode tersebut maka peneliti memperoleh kemudahan untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa dan kegiatan organisasi sebagaimana adanya dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian (Cresswell, 2009). Pada prosesnya hal dimaksud menekankan kepada pemaknaan, penalaran, definisi suatu situasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang diawali dengan observasi pada pra penelitian untuk memahami masalah penelitian. Atas dasar ini dan ditunjang oleh hasil kajian teori, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini mengkaji secara teoretis mengenai efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang dapat divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian yang di dalamnya teknik pengumpulan data memegang peranan penting mengingat hal tersebut merupakan serangkaian proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2013).

Oleh karena penelitian ini tidak membuat perlakuan atau bermaksud untuk memanipulasi variabel, maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun informan terdiri dari tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pembanding yang ditetapkan secara purposif. Jumlahnya 8 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun dan 2 orang anggota masyarakat. Mereka dipandang mengetahui secara baik informasi berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Pada konteks ini, instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati yang berguna untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah serta hasilnya lebih baik dan sistematis (Sugiyono, 2013). Adapun instrument dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara. Kemudian, setelah diperoleh data hasil penelitian dilakukan analisis data dengan mengikuti pemikiran Miles dan Huberman (Moleong, 2017), yaitu berupa analisis data secara interaktif dengan teknik-tekniknya meliputi: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan bernegara karena merupakan salah satu kriteria untuk mengukur keberhasilan negara/pemerintah dalam melaksanakan fungsinya (Bellone, 1980). Isu penting berkaitan dengan

hal tersebut adalah bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya, dana, sarana dan prasarana pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan supaya mencapai tujuannya (Siagian, 2006). Termasuk ke dalamnya adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur perdesaan agar mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dubnick, 2003). Efektivitas merujuk kepada kondisi dimana organisasi memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan dan sasaran secara tepat dan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Steers, 1985). Pada era demokrasi dimana masyarakat selalu menuntut pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan transparan, kebutuhan akan efektivitas tersebut semakin tinggi yang diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Karena itu, pada penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tentang keuangan harus dikelola secara efektif berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib disertai dengan dukungan adanya disiplin menggunakan anggaran.

Sebagai orientasi kerja pada organisasi, efektivitas menyoroti tentang: 1) sumber daya, dana dan sarana serta prasarana yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan yang jumlahnya sudah ditentukan/dibatasi; 2) jumlah dan mutu pelayanan jasa yang diberikan sudah ditentukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai; 3) batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya; dan 4) tata cara yang ditempuh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditetapkan (Gibson et al., 2001). Pada praktiknya dengan mengacu kepada hal tersebut, maka efektivitas selalu menunjukkan pada kondisi tercapainya hasil dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sering dikaitkan dengan efisiensi meskipun ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas lebih menekankan kepada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat kepada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan

membandingkan antara input dan output. Meskipun demikian, efektivitas dan efisiensi saling berkaitan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Pada pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, efektivitas dimaksud merupakan suatu keadaan/kondisi dimana penggunaan DD berhasil mencapai tujuannya (Steers, 1985). Dalam konteks ini mengingat efektivitas penggunaan DD merupakan suatu *ultimate criterion* setelah berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mencapai tujuannya, maka pengukurannya dipandang tepat apabila menggunakan pendekatan sistem yang melakukan proses-proses pokok berkaitan dengan efektivitas dan tidak memandangnya sebagai suatu keadaan akhir (Georgopaulus dan Tanenbaum dalam Steers, 1985). Artinya penilaian efektivitas penggunaan DD tidak cukup menggunakan kriteria tercapainya tujuan atau keadaan akhirnya, tetapi juga menyertainya dengan usaha yang mengarah kepada tercapainya tujuan sehingga menggambarkan seluruh siklus input-process-output dan hubungan timbal-balik antara penggunaan DD dengan lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut, (Gibson et al., 2001) mengemukakan 5 kriteria efektivitas dalam mengukur kegiatan organisasi pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan DD pada pembangunan infrastruktur perdesaan yang meliputi: 1) produksi; 2) efisiensi; 3) kepuasan; 4) keadaptasian; dan 5) pengembangan. Kriteria tersebut dipilih karena membantu memperbesar kemungkinan tercapainya efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan (Prace dalam Steers, 1985). Selain itu sesuai dengan tujuan DD, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga DD tidak sekedar digunakan tetapi lebih jauh dari itu mengisyaratkan investasi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan hasil penelitian, produksi pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan berkaitan dengan kesesuaian antara pembangunan infrastruktur perdesaan dengan kebutuhan masyarakat



dan kualitas pembangunan infrastruktur itu sendiri menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhinya walaupun belum maksimal. Ini tampak dari aktivitas pembangunan infrastruktur yang sudah cukup memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitasnya dinilai sudah cukup baik pula walaupun belum sepenuhnya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat. Artinya aktivitas pembangunan infrastruktur dimaksud belum merata, sehingga menuntut pemerintah desa untuk melakukan pendataan ulang terkait dengan kebutuhan masyarakat tentang infrastruktur yang harus dibangun di setiap wilayah desa.

**TABEL 1. Hasil Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022.**

No.	Jenis Pembangunan Infrastruktur	Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Desa	Rp.69.000.000	ADD
2	Pemeliharaan Irigasi Pesawahan	Rp. 27.000.000	PBP
3	Pemeliharaan Gedung Desa	Rp. 13.000.000	ADD
4	Penyediaan Sarana dan Aset Desa	Rp. 21.000.000	ADD
5	Pemeliharaan Posyandu	Rp. 82.800.000	DD & PAD
<b>TOTAL</b>		Rp. 212.800.000	

Sumber: Arsip Desa Cinengah, 2022.

Efisiensi berkaitan dengan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan penting untuk diperhatikan. Alasannya karena biaya untuk membangun infrastruktur perdesaan tidak selalu tersedia secara memadai. Hakikatnya efisiensi tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, kesesuaian antara

dana yang digunakan dengan yang telah ditetapkan sebelumnya serta kondisi kualitas pembangunan infrastruktur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhi hal tersebut walaupun belum secara keseluruhan bersifat maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Selain itu, dana yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur perdesaan telah berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan dan sudah cukup tepat sasaran, sehingga berbanding lurus dengan kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang ada walaupun masih kurang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa di satu pihak, pemerintah desa telah berusaha melakukan penghematan dalam arti menggunakan anggaran sesuai dengan keperluan membangun infrastruktur, suatu sikap dan perilaku yang mempunyai arti ekonomi dalam melaksanakan program pembangunan (Papasi, 1994), dan di pihak lain menunjukkan masih terdapat aktivitas pembangunan infrastruktur yang tidak merata di beberapa wilayah desa dan pada beberapa aspek kualitasnya kurang baik. Atas dasar ini, maka efisiensi berkaitan efektivitas pengelolaan DD pada pembangunan infrastruktur perdesaan belum maksimal.

Kemudian, aspek kepuasan pada efektivitas pengelolaan DD pada pembangunan infrastruktur perdesaan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan baik bagi pegawai pemerintah maupun masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhinya walaupun belum maksimal. Ini tampak dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang hampir semuanya didasarkan kepada aspirasi masyarakat yang ditempuh melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemerintah desa telah menjadikan Musrenbangdes sebagai instrumen untuk meluaskan basis peran serta, meningkatkan akses terhadap sumber-sumber daya dan mendorong perubahan (Bryant & White, 1989), yang

pada gilirannya dapat mewujudkan rencana program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian pada realitasnya masih ada beberapa wilayah desa yang pembangunan infrastrukturnya belum maksimal seperti berupa jalan mengingat di samping letak geografis desa didominasi oleh pegunungan dan persawahan sehingga menjadi kendala dalam distribusi sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, juga biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut masih terbatas. Demikian pula mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pegawai dalam pelaksanaann tugasnya sudah terpenuhi.

Aspek keadaptasian berkaitan dengan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan merujuk kepada kemampuan pemerintah desa untuk mengembangkan teknologi yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur perdesaan dan kesiapan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhi hal tersebut, yang ditandai dengan aktivitas pemerintah desa dalam mengadaptasi perkembangan teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seperti misalnya mengelola keuangan sudah berbasis aplikasi. Selanjutnya mengenai kesiapan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman sudah cukup baik mengingat telah ada respon yang cepat dari pemerintah desa ketika ada keluhan dari masyarakat disertai dengan sikap yang cukup terbuka dan kesediaan pemerintah desa untuk menerima saran dari Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun stakeholders lainnya. Hal terakhir tersebut menunjukkan telah digunakannya konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana pemerintah desa bukan satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai aktor utama dalam hal tersebut karena setiap persoalan yang terjadi di dalamnya tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah desa (Dwipayana, Ari; Eko, 2003). Dengan perkataan lain, keadaptasian berkaitan

dengan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan sudah terwujud. Adapun aspek pengembangan pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan berkaitan dengan peningkatan kapasitas pegawai dan pengembangan sarana dan prasarana dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, maka berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhinya. Hal tersebut tampak dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Pemerintah desa telah memahami tentang pentingnya kedua aspek itu untuk akselerasi proses dan terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Siagian, 2006). Dengan demikian, aspek pengembangan berkaitan dengan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan sudah terwujud.

Mencermati uraian di atas, efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat dinilai cukup baik. Artinya, pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur telah memenuhi kriteria efektivitas walaupun kondisinya belum maksimal, sehingga masih perlu upaya untuk meningkatkannya. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan hal tersebut meliputi: 1) belum maksimalnya perencanaan mengenai pembangunan infrastruktur perdesaan; 2) belum meratanya pelaksanaan aktivitas pembangunan infrastruktur perdesaan; dan 3) belum maksimalnya kualitas pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pembangunan infrastruktur perdesaan

yang diukur dengan produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan, maka kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat telah diwujudkan walaupun belum maksimal. Ini tampak dari produksi pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang berupa aktivitas pembangunan tersebut yang sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam arti aktivitas pembangunan dimaksud belum merata. Kemudian, efisiensi pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang sudah sesuai dengan rencananya dalam RKPDes serta RPJMdes serta dana yang dikeluarkan berdasarkan RAB sudah cukup tepat sasaran, sehingga berbanding lurus dengan kualitas hasil pembangunan. Kepuasan pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang berupa terpenuhinya kebutuhan baik bagi pegawai pemerintah maupun bagi masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur perdesaan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha memenuhinya walaupun belum maksimal. Ini tampak dari aktivitas pembangunan infrastruktur perdesaan yang hampir semuanya dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) disertai dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pegawai desa dalam melaksanakan tugasnya, meskipun masih ada aktivitas pembangunan infrastruktur pada beberapa wilayah desa yang masih belum maksimal mengingat letak geografinya yang didominasi oleh pegunungan dan persawahan. Selanjutnya, keadaptasian pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang berupa kemampuan pemerintah desa dalam pengembangan teknologi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan dan kesiapannya dalam merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman, menunjukkan bahwa

pemerintah desa telah memenuhinya. Hal ini ditandai dengan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya yang sudah mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada, misalnya pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi. Kemudian, kesiapan pemerintah desa dalam merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman sudah cukup baik, mengingat kemampuannya untuk merespon secara cepat mengenai keluhan dari masyarakat disertai dengan sikap keterbukaan pemerintah desa dalam menanggapi keluhan dimaksud serta menerima saran dari masyarakat melalui wakilnya sebagai pengurus BPD maupun stakeholder lainnya. Adapun pengembangan pada efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang berupa peningkatan kapasitas pegawai dan pengembangan sarana dan prasarana dalam aspek pembangunan infrastruktur perdesaan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memenuhinya. Hal ini ditandai dengan aktivitasnya meningkatkan kapasitas pegawai serta pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka dalam tugasnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran pada penelitian ini meliputi sebagai berikut:

Mengingat pentingnya produksi, efisiensi, kepuasan, pengembangan, dan keadaptasian dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan Dana Desa (DD) pada pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, maka hendaknya: 1) pemerintah desa dituntut untuk meninjau secara menyeluruh mengenai topografi wilayahnya sebelum disusun rencana pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga tidak saja dapat dibuat prioritas mengenai aktivitas pembangunan tersebut, tetapi juga perencanaan aktivitas pembangunan dimaksud sesuai dengan

kebutuhan masyarakat; 2) pemerintah desa dituntut meningkatkan kemampuannya untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung dalam arti mendatangi mereka di setiap wilayah desa agar diperoleh informasi secara akurat berkaitan dengan aktivitas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkannya; 3) dalam merencanakan pembangunan desa, pemerintah desa dituntut untuk tidak saja melibatkan seluruh komponen masyarakat, tetapi juga pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat agar memperoleh arahan yang tepat dalam merencanakan aktivitas pembangunan tersebut; 4) pemerintah desa hendaknya memanfaatkan secara maksimal sumberdaya lokal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga muncul rasa memiliki di kalangan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan tanggung jawabnya terhadap pembangunan tersebut; 5) pemerintah desa dituntut untuk transparan dalam menggunakan sumberdaya pada pembangunan infrastruktur perdesaan yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan; dan 6) mengingat belum memadainya penyampaian informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa khususnya mengenai pembangunan infrastruktur perdesaan, maka pemerintah desa dituntut untuk membuat platform media penyampaian informasi dimaksud seperti berupa media sosial maupun website.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan, mengingat masih banyak aspek yang perlu dikaji berkaitan dengan efektivitas pengelolaan DD dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, khususnya di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.

## **REFERENSI**

- Bellone, C. J. (1980). *Organization Theory and The New Public Administration*. Allyn and Bacon.
- Bryant, & White, C. (1989). *Manajemen Pembangunan untuk Negara*

- Berkembang*. LP3ES.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dubnick, M. J. (2003). Accountability and Ethics Reconsidering The Relationship. *Accountability and Ethics Reconsidering The Relationship*, 6(International Journal of Organization Theory and Behavior).
- Dwipayana, Ari; Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE.
- Elcock, H. (2005). *Local Government* (Third Edit). Routledge.
- Fauzi, A. (2019). *Efektivitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Kelambu Kecamatan Badri Kabupaten Tapanuli Tengah*. Universitas Muhamadiyah Medan.
- Gibson, James, J. L., Ivancevich, J. H., & Donelly. (2001). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku Struktur dan Proses* (Djoerban Wahid (ed.)). Erlangga.
- Marbun, B. N. (2008). *Proses Pembangunan Desa*. Erlangga.
- Mc Andrew; Ichlasul Amal. (2001). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*. PT Raja Grafindo.
- Moleong, L. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Papasi, J. M. (1994). *Administrasi Pembangunan*. Pionir.
- Parikesit. (2004). *Landasan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Perdesaan*. TKPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Sedarmayanti. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusiadan Produlktivitas*. Penerbit Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2006). *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung.
- Solihatul, F. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi* (Magdalena (ed.)). Erlangga.



Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.